

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. SEJARAH PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

1. Sejarah dan Metaformosis Partai Golongan Karya

Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber GOLKAR di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber GOLKAR didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama GOLONGAN KARYA (Sekber GOLKAR).

Sekber GOLKAR didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber GOLKAR ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber GOLKAR ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber GOLKAR adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965.

Jumlah anggota Sekber GOLKAR ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber GOLKAR dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber GOLKAR adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945.

Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan keayaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Ke- 7 (tujuh) KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber GOLKAR ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesarannya dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang.

Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR. Hasilnya di luar dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional.

NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR.

GOLKAR menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamakan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Setelah Peristiwa G30S maka Sekber GOLKAR, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya GOLKAR dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru.

Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan GOLKAR. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader GOLKAR. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap GOLKAR lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu GOLKAR yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pemegang. Kemenangan GOLKAR selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir. Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada GOLKAR. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka GOLKAR juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu GOLKAR dicerca di mana-mana.

Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, GOLKAR berubah wujud menjadi Partai GOLKAR. Saat itu GOLKAR juga mengusung citra sebagai GOLKAR baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan GOLKAR dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum GOLKAR yang cukup legendaris. Partai GOLKAR kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai

baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai GOLKAR mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP dengan. Namun pada pemilu berikutnya GOLKAR kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 GOLKAR menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah.

Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai GOLKAR kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali membawa GOLKAR memenangkan pemilu. Dia menargetkan GOLKAR menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014 nanti. Ketua Umum GOLKAR dari masa ke masa :

1. Djuhartono (1964-1969)
2. Suprpto Sukowati (1969-1973)
3. Amir Moertono (1973-1983)
4. Sudharmono (1983-1988)
5. Wahono (1988-1993)
6. Harmoko (1993-1998)
7. Akbar Tandjung (1998-2004)
8. Jusuf Kalla (2004-2009)
9. Aburizal Bakrie (2009-sekarang)

2. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Partai GOLKAR Provinsi

D.I.Yogyakarta

Awal berdirinya partai Golkar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat ditampikkan dari pagar dinamika politik pada level pusat. Meskipun dalam paradigma barunya partai GOLKAR sekarang ini mengaku menyebut dirinya sebagai partai yang demokratis, moderat, yang berakar dan terpisah dari pemerintah, akan tetapi pada dasarnya kehadiran Partai GOLKAR saat ini secara formal merupakan keberlangsungan yang tertuang dalam AD/ART Partai GOLKAR. Terbentuknya partai GOLKAR dapat dimaknai sebagai keinginan rezim yang berkuasa guna memperisapkan para anggotanya sebagai mesin politik.

Partai GOLKAR berupaya menjadikan partai ini sebagai partai yang benar-benar menganut makna sistem politik pasca reformasi. Dimana partai GOLKAR tidak hanya harus menjaga jarak dengan pemerintah tetapi juga hendak mengapus stigma sejarah yang melekat di diri partai GOLKAR. Partai Golkar berusaha untuk menjadi partai dalam makna yang sebenar-benarnya, yang mengaspirasikan kepentingan masyarakat serta berbuat kepentingan masyarakat, tidak lagi sekedar partai yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk melegalkan segala cara untuk legitimasi kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan bersikap kritis dalam mensikapi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam semua level implementasi.

Partai GOLKAR secara maksimal berupaya secara mandiri dalam pengambilan keputusan, pengendalian seluruh proses dan dinamika organisasi

dengan menghilangkan struktur Dewan Pembina yang terdahulu merupakan salah satu alat rezim untuk mengendalikan Partai GOLKAR. Partai GOLKAR akan terus menunjukkan eksistensinya dalam koridor fungsi partai yang sesungguhnya walaupun partai GOLKAR secara organisatoris serta kelembagaannya merupakan rancangan pemerintah sebagai mesin politik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagaimana ditingkat pusat, kelahiran dan pertumbuhan GOLKAR di Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata tidak menunjukkan bahwa partai GOLKAR terinstitusional.

B. PARADIGMA DAN DOKTRIN PERJUANGAN

1. Paradigma dan Doktrin Perjuangan

Paradigma baru partai GOLKAR ini berisi pokok-pokok doktrin, visi, misi, platform politik. Di dalam perumusan paradigma baru ini ada terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek pembaruan ditunjukkan melalui perubahan struktur atau kelembagaan, dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan partai GOLKAR untuk tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya kerjanya. Perubahan-perubahan di atas selanjutnya diformulasikan dalam suatu paham baru GOLKAR yang disebut dengan "Paradigma Baru Partai GOLKAR". Oleh GOLKAR, maksud dari paradigma baru adalah sebagai berikut :

Pembaruan ini disamping dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama, juga diarahkan untuk mewujudkan Partai GOLKAR yang mandirian, demokratis, kuat, solid, berakar dan responsif. Dengan paradigma baru maka Partai GOLKAR diharapkan menjadi Partai politik yang modern dalam pengertiannya yang sebenarnya. Yakni, tidak lagi sebagai "Partainya penguasa"

(the ruler's party) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan sebagaimana dalam paradigma lama.

Pembaruan paradigma itu sendiri didorong oleh faktor utama yang berasal dari diri Partai GOLKAR sendiri, yakni jati diri dan watak GOLKAR sebagai kekuatan pembaru. Sebagaimana disebutkan pada poin keempat dari IKRAR PANCA BHAKTI GOLONGAN KARYA, etos atau semangat pembaruan pada sejatinya merupakan fitrah atau sikap dasar Partai GOLKAR sejak kelahirannya. Fitrah inilah yang mendorong dilakukannya pembaruan ini. Dengan demikian, pembaruan paradigma ini merupakan pengejawantahan belaka dari fitrah tersebut.

Paradigma baru Partai GOLKAR ini telah mulai diwujudkan melalui pembaruan internal, terutama terhadap struktur atau kelembagaan organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap organisasi yang membatasi kemandirian Partai GOLKAR. Langkah-langkah pembaruan kelembagaan tersebut juga diikuti dengan diwujudkannya prinsip kedaulatan ditangan anggota, yaitu mekanisme pengambilan setiap keputusan organisasi dilakukan secara lebih terbuka, demokratis, dari bawah (*bottom-up*), dan dengan pemungutan suara secara langsung. Melalui mekanisme yang demokratis ini maka terbukalah peluang bagi kader-kader untuk memimpin Partai karena memang dalam perspektif demokrasi kesempatan dan peluang perlu disediakan untuk semua, sehingga tidak terjadi pemusatan pandangan pada pesona figur tunggal yang mengarah pada kultus individu.

Implikasi lain dari serangkaian pembaruan tersebut adalah sangat berarti, yakni Partai GOLKAR menjadi benar-benar mandiri dan mampu mewujudkan

tegaknya asas kedaulatan ditangan anggota sebagai salah satu prinsip utama dari Partai yang modern,demokratis, dan mengakar. Partai GOLKAR bertumpu hanya pada kekuatannya sendiri,tidak mengandalkan kekuatan di luar dirinya,dan selanjutnya dapat mengambil keputusan-keputusan organisasional secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar atau golongan manapun.

2. DOKTRIN PERJUANGAN

Dengan paradigma baru ini, doktrin Partai GOLKAR tetap sebagai kelanjutan dari Sekretariat Bersama (SEKBER) GOLONGAN KARYA yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Partai GOLKAR tetap berpegang pada doktrin karya kekaryaan,yaitu Karya Siaga Gatra Praja, tetapi dipahami secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan jaman.

Dengan doktrin karya kekaryaan maka Partai GOLKAR selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi,bukan dalam perspektif ideologi,apalagi aliran. Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai GOLKAR adalah pengelompokan berdasarkan peran dan fungsinya.Dengan doktrin karya kekaryaan Partai GOLKAR berorientasi pada program (program oriented) dan atau pemecahan masalah (problem solving),bukan berorientasi pada aliran atau ideologi (ideology oriented). Dengan perspektif ini ingin ditegaskan bahwa GOLKAR tidak sependapat dilakukannya pengelompokan politik berdasarkan primordialisme dan sektarianisme. Pembelahan masyarakat berdasarkan ideologi atau aliran-aliran dikhawatirkan akan melahirkan konflik-konflik ideologi yang bermuara pada pertentangan, perpecahan, dan masalah disintegrasi bangsa.

Dengan orientasi ini maka masyarakat tidak akan terjebak dalam pertentangan atau konflik ideologi yang tidak perlu, melainkan berorientasi pada karya untuk membangun bangsa. Bagi Partai GOLKAR karya yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat adalah lebih penting daripada ide atau gagasan semata. Karya kekaryaan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan menyeluruh, untuk mendatangkan manfaat bagi rakyat. Karya kekaryaan adalah juga amal shalih dalam pengertian yang luas sebagaimana yang diajarkan agama-agama.

Oleh karena doktrin inilah Partai GOLKAR senantiasa prihatin menyaksikan kehidupan politik yang ditandai oleh maraknya persaingan tidak sehat di antara berbagai Partai politik yang membawa terjadinya konflik dan pertentangan politik yang tajam. Masing-masing Partai politik berusaha memobilisasi dukungan massa bagi kepentingan sempit, sehingga kepentingan bangsa yang lebih luas terabaikan. Sebagai akibat dari kecenderungan tersebut, Bangsa Indonesia kehilangan momentum untuk membangun diri guna mewujudkan cita-cita proklamasi.

Kegandrungan (euphoria) untuk menjadikan politik sebagai panglima kehidupan dan menekankan ideologi politik sektarianistik, seperti pada pengalaman lama, telah menghambat proses mensejahterakan rakyat. Sebagai akibatnya rakyat terjerebab ke dalam kemiskinan dan keterbelakangan dalam suasana ketidakpastian politik. Dalam suasana seperti itulah Partai GOLKAR tampil dengan doktrin karya kekaryaan karena tidak ingin bangsa ini terpecah ke dalam kotak-kotak sempit yang hanya akan mengancam keutuhan bangsa.

3. IKRAR

IKRAR “PANCA BHAKTI”

PARTAI GOLKAR

- 1) Kami warga partai golongan karya adalah insan yang percaya dan taqwa kepada tuhan yang maha esa;
- 2) Kami warga partai golongan karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamsi 1945, pembela serta pengamal pancasila;
- 3) Kami warga partai golongan karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan;
- 4) Kami warga partai golongan karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib, dan sentausa;
- 5) Kami warga partai golongan karya setia kepada undang undang dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab, dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan.

4. IMPLEMENTASI DOKTRIN DAN IKRAR

Secara individual implementasi doktrin dan ikrar menuntut anggota partai untuk :

- a. Menjadikan paradigma baru sebagai sikap anggota partai
- b. Memiliki militansi terhadap partai melalui prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

- c. Demokratis dalam arti menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dimana kedaulatan ditangan anggota yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan organisasi.
- d. Semangat anti KKN bersemayam dalam setiap diri anggota yang melandasi setiap gerak langkahnya.
- e. Semangat pengabdian yang ditandai dengan jiwa pengorbanan dan keikhlasan untuk partai dalam bentuk pemikiran, material, dan tindakan.
- f. Menjunjung tinggi nilai perjuangan partai untuk mewujudkan kesejahteraan anggota partai.

C. Pokok-Pokok Program Umum Partai GOLKAR

Pokok – pokok program umum Partai GOLKAR merupakan refleksi visi, misi, strategi dan platform Partai Golkar yang mengamanatkan pembaharuan struktur, aturan organisasi maupun program program perjuangannya. Oleh karena itu visi, misi dan strategi yang diwujudkan pada usaha-usaha pelaksanaan program akan menempatkan Partai GOLKAR sebagai organisasi modern, solid, dan mengakar, yang bercirikan pada sifat mandiri, responsif, terbuka dan demokratis.

Dalam rangka mengaktualisasikan platform tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partai Golkar bukan hanya mengembangkan wawasan kebangsaan atau nasionalisme semata, melainkan juga mengutamakan upaya mewujudkan keadilan ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya bagi semua daerah. Perwujudan keadilan adalah bagian utama dari program perjuangan partai GOLKAR untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai GOLKAR akan terus berjuang untuk memperdayakan masyarakat di daerah disegala bidang ; menghormati dan menghargai upaya-upaya pelestarian budaya lokal ; mendorong otonomi daerah secara nyata ; dilaksanakan perimbangan keuangan pusat dan daerah ; mengatasi segala bentuk konflik horizontal dan vertikal ; dan mengatasi segala bentuk upaya pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memantapkan wawasan kebangsaan maka Partai GOLKAR berjuang untuk memperkokoh segenap potensi bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; memelopori segala upaya penguatan kesatuan dan persatuan; mengembangkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan membangun citra bangsa yang positif dimata internasional ; dan mencegah berkembangnya nasionalisme sempit.

Dalam rangka merealisasikan platform sebagai Partai terbuka dan majemuk Partai GOLKAR berjuang untuk mengembangkan dan menbudayakan wawasan keterbukaan (inklusifisme) dan kemajemukan (Pluralisme) dalam tubuh partai ; mengakui dan menghargai kemajemukan latar belakang anggota dan justru memandanag kemajemukan sebagai potensi untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Partai GOLKAR juga memandang kemajemukan bangsa sebagai potensi sebagai mozaik ke-Indonesiaan yang justru memperkokoh integrasi bangsa. Dalam kaitan ini pula maka upaya untuk memperkokoh keberadaan Partai GOLKAR sebagai Partai Kebangsaan terus ditingkatkan.

kerukunan hidup antar umat beragama. Sebagai partai yang menjunjung tinggi ajaran agama,partai GOLKAR selalu mengajak umat beragama untuk menghindarkan diri dari kecenderungan politisi agama,yakni menjadikan simbol-simbol keagamaan sebagai alat untuk tujuan-tujuan politik yang terbatas.

Akhirnya, sebagai Partai yang menjunjung tinggi ajaran agama-agama dan memegang teguh etika dan moralitas agama,partai GOLKAR dengan kesadaran penuh berusaha mendorong upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa,dan berakhlak mulia. Partai GOLKAR berjuang untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,serta terus membangun karakter bangsa berdasarkan ajaran agama.

1. Tujuan Partai GOLKAR

Tujuan Partai GOLKAR pada dasarnya adalah sama dengan tujuan sejak kelahirannya, yaitu: Mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagai mana di maksud dalam UUD 1945. Menciptakan masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia

2. Tugas Pokok Partai Golkar

Tugas pokok Partai GOLKAR adalah Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.

3. Visi Perjuangan Partai GOLKAR

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan

bertaqwa,berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia,cinta tanah air, demokratis,dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri,terbuka, egaliter,berkesadaran hukum dan lingkungan,menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan hakiki yang merupakan nafas dari gerakan reformasi. Atas dasar pandangan keterbukaan tersebut,kita harus menciptakan sistem sosial politik yang terbuka dan transparan dengan struktur dan proses politik yang dapat secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Untuk itu maka peluang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik mutlak dibuka seluas-luasnya. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat semakin terjamin dan dilindungi oleh undang-undang.Sendi Utama masyarakat madani adalah supremasi hukum.Oleh karena negara kita adalah negara hukum maka supremasi hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan sistem politik yang

demokratid dan berdasarkan hukum.Partai GOLKAR memandang bahwa reformasi hukum tidak terbatas hanya paa penyempurnaan sarana dan prasarana, materi dan aparatur hukum, tetapi juga budaya hukum.

Di bidang ekonomi visi partai GOLKAR adalah ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahawa hanya sistem perekonomian rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahawa sistem perekonomian inilah yang menjamim rakyat makin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau menekankan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi ternyata justru membawa negara dan bagsa Indonesia terjerebab ke dalam krisis ekonomi yang sangat parah. Konglomerasi ternyata semu dan sangat rapuh terhadap goncangan ekonomi global. Dalam konteks ini, maka paradigma ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang sangat kuat bagi penguatan fundamental ekonomi di Indonesia.

Dengan visi ekonomi kerakyatan ini, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasiona. Partai GOLKAR menginginkan dimasa depan usaha menengah, kecil, dan koperasi yang menjadi ujung tombak pemeberdayaan masyarakat dalam pengertian yang sebenarnya. Tanpa upaya-upaya pemberdayaan rakyat, maka tujuan menciptakan masyarakat madani akan semakin jauh dari gapaian.Untuk itu sejalan dan sejarah visi menciptakan kesejahteraan rakyat, perhatian terhadap upaya penguatan usaha menengah, kecil, dan koperasi menjadi priritas yang apling diutamakan.

Di bidang sosial budaya, Partai GOLKAR mencita-citakan penguatan budaya yang mampu melahirkan bangsa yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh dan memiliki etika yang kuat. Untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat semacam itu maka perlu dikembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi berkembangnya budaya ilmu (etos intelektualisme), budaya kerja (etos kerja), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius di kalangan masyarakat.

Partai GOLKAR memandang kerukunan sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu, maka kehidupan sosial budaya yang berkeadilan dan terjembatannya kesenjangan sosial ekonomi antar individu, antar kelompok, antar kota-desa, antara Jawa-luar Jawa, dan antar pusat-daerah, menjadi agenda penting yang harus dipentingkan. Demikian juga halnya pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama menjadi kepedulian partai GOLKAR.

Dengan visi ini pula Partai GOLKAR hendak mengembangkan pola hubungan sosial yang lebih harmonis dan dilandasi oleh semangat persamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dari segenap masyarakat kita, dan diganti dengan pandangan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sejati antar warga negara.

4. Misi Partai GOLKAR

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu:

Pertama, mempertegas komitmen partai untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

5. Platform Partai GOLKAR

Platform adalah landasan berpijak dari mana dan ke arah mana arah perjuangan dilanjutkan dan dipertahankan. Platform ini membedakan Partai GOLKAR dengan organisasi kekuatan sosial politik atau partai politik lain. Platform yang merupakan sikap dasar GOLKAR ini merupakan kristalisasi dari pemahaman, pengalaman dan kesadaran historis GOLKAR dalam membangun bangsa dimasa depan.

GOLKAR berpijak pada landasan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pemahaman ini GOLKAR baru menolak gagasan negara federal dan setuju dilakukannya pengurangan terhadap kecenderungan sentralisme dalam pengelolaan negara dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah. GOLKAR berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah satu cara pandang yang mengatasi paham golongan dan kelompok baik atas dasar suku, etnis, agama, bahasa, aliran maupun atas dasar kebudayaan. Dengan wawasan ini, maka semua potensi bangsa mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal, sehingga kelompok minoritas sekalipun akan merasa seperti berada di rumahnya sendiri. Potensi-potensi ini bahkan kemudian harus dihimpun sehingga menjadi kekuatan yang besar.

GOLKAR adalah partai majemuk (pluralis). GOLKAR adalah partai yang menampung kemajemukan bangsa Indonesia. Bagi GOLKAR kemajemukan adalah anugerah Tuhan yang membentuk mozaik ke-Indonesia-an yang sangat indah dan mempesona yang berbuhul dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Komitment ini akan dipertahankan oleh GOLKAR sepanjang masa, karena komitment pada keterbukaan dan kemajemukan adalah merupakan komitment pada keterbukaan dan kemajemukan adalah merupakan komitment pada identitas ke-Indonesia-an. Dengan demikian maka GOLKAR tidak sependapat dengan pembelahan masyarakat (social fragmentation) berdasarkan sifat primordial dan sektarian. Dengan sikap yang non-aliran dan non-sektarian, GOLKAR mengembangkan perspektif fungsi sehingga pendekatan yang dilakukan adalah berorientasi pada program (program oriented) bukan berorientasi ideologi (ideology oriented).

GOLKAR adalah partai yang komitment pada demokrasi. Demokrasi yang hendak dibangun adalah Demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi yang dilandaskan pada prinsip dan nilai Pancasila. GOLKAR Baru menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan yang memperkokoh dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. GOLKAR adalah partai yang berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan nasional. Peningkatan kesejahteraan itu diwujudkan antara lain dengan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh. Dengan sikap ini GOLKAR mempertegas keberpihakan pada rakyat

GOLKAR adalah partai yang komitment pada penegakan hukum, keadilan dan hak-hak asasi manusia. Sebagai partai politik yang hidup di negara yang berdasarkan hukum, maka GOLKAR senantiasa mengupayakan terwujudnya supremasi hukum di segala bidang. Komitment ada penegakan hukum, keadilan, dan hak-hak asasi manusia ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka

mewujudkan pemerintahan dan tata kehidupan bernegara yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum.

GOLKAR adalah partai yang senantiasa mendasarkan gerak langkahnya pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan ajaran agama . Etika dan moralitas adalah saripati agama dan buah dari keberagamaan itu sendiri. Dengan komitmen ini GOLKAR menempatkan keimanan dan ketakwaan sebagai salah satu asas pembangunan. Dalam persepsi yang demikian maka agama menempati kedudukan yang sangat penting karena agama memiliki fungsi motivatif, inspiratif, dan sublimatif.

GOLKAR adalah Partai yang dalam setiap gerak langkahnya senantiasa berpijak pada wawasan pembaharuan dan pembangunan yang telah menjadi sikap dasar GOLKAR sejak kelahirannya, bahkan menjadi salah satu butir dari nilai-nilai dasar GOLKAR seperti tercantum dalam Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya GOLKAR adalah pelopor Pembaharuan dan Pembangunan. Sikap dasar ini membawa GOLKAR senantiasa mendorong gerakan reformasi secara menyeluruh yang dilangsungkan secara gradual , inkremental, dan konstitusional.

D. Modal Perjuangan Partai GOLKAR

Sebagai Partai modern Partai GOLKAR memiliki sejumlah potensi atau kekuatan yang dapat dijadikan modal perjuangan dalam rangka merealisasikan doktrin, visi, misi, platform, dan pokok-pokok program perjuangannya.

Pertama, potensi historis. Partai GOLKAR telah berusia lebih dari tiga setengah dasawarsa yang didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat dari seluruh lapisan. Partai GOLKAR memiliki pengalaman panjang dalam menyertai

perjalanan bangsa baik di bidang pemerintahan, legislatif, maupun yudikatif. Serangkaian pengalaman panjang ini merupakan potensi historis yang luar biasa besar.

Kedua, Partai GOLKAR memiliki infrastruktur yang sangat kuat yang masih terpelihara dengan baik. Struktur organisasi mulai dari pusat sampai ke desa/kelurahan berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing dalam satu kesatuan manajemen organisasi yang modern. Hubungan Partai GOLKAR dengan Orsosmasinal dan Orsinalmas, juga dengan organisasi-organisasi yang mendirikan dan didirikannya berjalan secara horizontal dan fungsional dan saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan yang setara.

Ketiga, Partai GOLKAR memiliki sumber daya manusia yang relatif berpengalaman, unggul dan lengkap. Kader-kader Partai GOLKAR tersebar dan hidup di tengah-tengah masyarakat, dan selalu tanggap terhadap aspirasi rakyat.

Keempat, Partai GOLKAR adalah Partai yang solid yang terbukti selalu dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis untuk berjuang membangun kehidupan bangsa yang bersatu dan kuat.

Kelima, Partai GOLKAR adalah Partai yang mengakar dan responsif, karena merupakan Partai politik yang di dalamnya para anggota dan kader-kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan asas prestasi (merit system). Sebagai Partai yang didirikan oleh kelompok-kelompok riil dalam masyarakat Partai GOLKAR tumbuh dan berkembang dari rakyat dan didukung oleh rakyat. Partai GOLKAR juga Partai yang responsif, yakni senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi, tuntutan, dan harapan rakyat, serta konsisten untuk

memperjuangkannya sehingga menjadi keputusan politik yang bersifat publik yang menguntungkan seluruh masyarakat.

Potensi-potensi tersebut adalah merupakan modal perjuangan yang sangat besar yang harus diaktualisasikan oleh segenap kader untuk mewujudkan doktrin, visi, misi, platform, dan pokok-pokok perjuangan sebagaimana dipaparkan di atas.

E. Arti lambang Partai GOLKAR

1. Penjelasan Tanda Gambar

- a. Berpegang perisai segilima yaitu melambangkan bahwa Partai GOLKAR tetap berpijak dengan teguh serta dijiwai Pancasila yang



- senantiasa menjadi pelindung, pengamal, dan dengan keuletan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Gambar Pohon Beringin dengan akar angin (suluh) sebanyak 8(delapandan) wicaksana (wisdom).
- c. Kapas dengan kelopak bunga berjumlah 17(tujuh belas) kelopak yang melambangkan kesejahteraan sandang.
- d. Padi dengan tangkai dan butir-butir sejumlah 45 (empat puluh lima) biji yang melambangkan kemakmuran pangan.
- e. Simpul tangkai padi dan kapas berjumlah 8 (delapan) buah yang melambangkan persatuan.

f. Makna gambar pita adalah pengikat guna membawa persatuan dan memelihara Golongan Karya di dalam melaksanakan tugasnya dalam mengabdikan pada nusa dan bangsa, dan tidak lupa menyembah Tuhan Yang Maha Esa.

g. Perisai segi lima melambangkan ideologi partai, yakni Pancasila.

h. 17 bunga kapas, 8 akar gantung pada beringin, dan 45 butir padi melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.

2. Makna Tanda Gambar

Dari keseluruhan makna tanda gambar partai Golongan Karya (GOLKAR) yaitu pengayoman yang teguh serta tangguh menuju kepada kesejahteraan atau kemakmuran, dijiwai semangat persatuan yang semuanya itu mengungkapkan bahwa GOLKAR berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

3. Makna Warna

a. Warna hijau melambangkan sifat kesuburan, kesegaran, dan kepercayaan.

b. Warna Kuning melambangkan sifat keluhuran yang bijaksana dan cendekia

c. Warna hitam melambangkan sikap kemandirian, keteguhan, dan kekekalan

d. Serta, Warna Putih yang melambangkan sifat kesucian yang bersih tanpa pamrih.

F. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar provinsi

D.I.Yogyakarta

1. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR DIY

Struktur organisasi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengaju pada JUKLAK Dewan Pertimbangan Partai, partai GOLKAR setelah disesuaikan dengan kondisi daerah demi tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Maka struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

a. Dewan Pertimbangan Partai, terdiri atas :

- 1) Seorang Ketua
- 2) Seorang Wakil Ketua
- 3) Tujuh orang anggota

b. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR, terdiri dari :

1) Pengurus Harian ;

- a) Seorang Ketua dengan dibantu oleh Ketua harian(jika Diperlukan) dan 14 Wakil Ketua.
- b) Seorang Sekretaris, dengan dibantu oleh 14 Wakil Sekretaris.
- c) Seorang Bendahara, dengan dibentuk oleh 2 wakil bendahara.

2) Pengurus Biro, terdiri dari :

dan fungsional partai sangat diperlukan dalam mengelola manajemen prograam kerja politik partai kedepan.

Mengingat banyaknya jumlah kader dan terbatasnya jumlah personalia yang dibutuhkan untuk duduk dalam struktural kepengurusan partai maka melalui MUSDA ke VII partai GOLKAR Provinsi D.I.Yogyakarta perlu juga mempertimbangkan memberi mandat kepada Dewan Pimpinan daerah partai GOLKAR provinsi D.I.Yogyakarta terpilih untuk membentuk badan dan lembaga Partai GOLKAR sesuai kebutuhan untuk lebih mengefektifkan kerja politik partai GOLKAR Provinsi D.I.Yogyakarta kedepan secara lebih fokus,terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan terget perjuangan partai GOLKAR.

Tabel 2.2
Pengurus harian Partai Golkar
Provinsi D.I Yogyakarta Masa bakti 2009-2015

No	Nama	Jabatan
1	Drs.H.M.Gandung Pardiman, MM	Ketua
2	W. FX Soedardi, SE	Sekretaris
3	Drs. John S.Keban	Wakil Ketua Pemenang Pemilu I
4	George BL Panggabean	Wakil Ketua Pemenang pemilu II
5	G. DedySuwardi SR,SH	Wakil Ketua Organisasi dan Hubungan Keseimbangan
6	Janu Ismadi, SE	Wakil Ketua Kaderisasi dan Keanggotaan
7	Slamet Bagya, SIP, SE	Wakil Ketua Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
8	HM Ikbal, SH	Wakil Ketua Hukum dan HAM
9	Subadi	Wakil Ketua Tani, Nelayan, Naker, Koperasi, dan UKM
10	R.Baroto Hartoto, ST	Wakil Pemuda, Mahasiswa,Perlajar dan OR
11	Setya Sudjati Soenarto, B.Sc	Wakil Ketua Pendidikan dan pelatihan.
12	Hj. Ranny Sumintarto, SE,MM	Wakil Ketua Pemberdayaan Perempuan

No	Nama	Jabatan
13	Drs.H.Ahmad Subangi	Wakil Ketua Keagamaan
14	Drs.Widyohari Murdiyanto M.Si	Wakil Ketua Seni Budaya dan Pariwisata
15	Drs.Geyol Sugianto,MSc	Wakil ketua lingkungan hidup dan Kesehatan Masyarakat
16	Drs. Yulianto, M.Si	Wakil Ketua Informasi dan Komunikasi
17	W.FX.Soedardi,SE	Sekretaris
18	Heroe, TH	Wakil Sekretaris Pemenang Pemilu Wilayah I
19	Slamet, Spd,MM	Wakil Sekretaris Pemenang Pemilu Wilayah II
20	Drs.Agung Mulyono, MM	Wakil Sekretaris Organisasi dan Hubungan Kelembagaan
21	Suwimbar, SE	Wakil Sekretaris Kaderisasi dan Keanggotaan
22	Ninuk Dian Suratri, SH	Wakil Sekretaris Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
23	Bambang Wahyu Hidayat, SH	Wakil Sekretaris Hukum dan HAM
24	B.Edy Koestantyo,SE	Wakil Sekretaris Tani dan Nelayan

No	Nama	Jabatan
25	Drs. R. bambang Sri Budoyo	Wakil Sekretaris Naker, Koperasi, dan UKM
26	Karel, SH	Wakil Sekretaris Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan OR
27	Drs. H. Joko Jumeno	Wakil Sekretaris Pendidikan dan Pelatihan
28	Florentina Diani Anindiati	Wakil Sekretaris Pemberdayaan Perempuan
29	Hj. Tati Burhanm, BA	Wakil Sekretaris Keagamaan
30	Drs. Totok Sudarwoto	Wakil Sekretaris Seni budaya dan olahraga
31	R. Ngt. Henny Tri Widayati, Spd	Wakil Sekretaris Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat
32	Awiek Roosprayitno	Wakil Sekretaris Informasi dan Komunikasi
33	Drs H. Haryadi	Bendahara
34	Suhud Imandoyo, SE	Wakil Bendahara I
35	Hj. Fariyani S. Hamdani, ST	Wakil Bendahara II

Arsip DPD Partai GOLKAR provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2014

G. Gerakan perempuan dalam Partai Golkar

Pasca masa reformasi merupakan refleksi bagi kaum perempuan untuk melakukan suatu gerakan, tentang bagaimana berjuang untuk menyampaikan kepentingan kepada pemerintah, khususnya dalam partai Golkar, baik secara nasional maupun lokal. Berdasarkan aspek legalitas, eksistensi perempuan dalam partai politik (kepengurusan partai) sudah diperkuat dengan Undang-undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan kuota 30% dalam kepengurusan partai politik, yang dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Iklim reformasi sudah memberi ruang bagi perempuan untuk ikut serta berpartisipasi politik dengan berbagai aktivitas, termasuk melakukan gerakan politik untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Disamping iklim, legal formal dengan UU. No. 2 tahun 2008 juga sudah memperkuat aktivitas perempuan untuk bergabung dalam kepengurusan partai politik. Berdasarkan hal tersebut maka sekarang yang terpenting adalah bagaimana kaum perempuan sendiri mampu memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada sebaik-baiknya, dengan cara mempersiapkan diri dengan kemampuan-kemampuan yang mendukung aktivitas perempuan dalam partai politik.

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik, khususnya dalam kepengurusan partai sangat penting sebagai proses pembelajaran perempuan, yang selama ini dianggap tidak memiliki kemampuan, kurang percaya diri, lemah secara fisik dan lemah dalam loby me-loby (*bargaining* politik), penakut, tidak memiliki pengalaman, langkah yang pendek, tuntutan keluarga (peran sebagai ibu), dominan perasaan, dan masih banyak alasan lainnya.

Bergabung dalam partai politik akan memberikan pengalaman yang baik bagi perempuan dalam dunia yang selama ini menjadi dunianya kaum laki-laki, serta akan menepis pandangan masyarakat(aspek budaya) terhadap keberadaan perempuan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas(aspek legal formal, partai politik dan kemampuan perempuan) maka tidak ada alasan bagi perempuan untuk tidak melakukan aktivitas politik, memperjuangkan kepentingan masyarakat(keluarga) pada umumnya dan kepentingan perempuan khususnya. Perjuangan yang dilakukan harus memiliki perencanaan, dan pertimbangan yang jelas serta terus menerus sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Secara teoritik menurut Tarrow ²⁷gerakan politik harus dibangun atas dasar tatanan nilai yang kokoh supaya tidak terjebak hanya menjadi gerakan reaktif. Minimal gerakan perempuan harus didudukkan dalam kerangka gerakan reformatif. Untuk sampai ke pada tahapan tersebut, maka sebuah gerakan harus memiliki empat hal, yakni :

1. agenda yang jelas mengenai apa yang diinginkan perempuan untuk dirubah dalam tatanankehidupan bernegara. Agenda atau paket politik yang ingin diperjuangkan dalam gerakanperempuan haruslah diturunkan dari tujuan yang telah dirumuskan secara matang.
2. Kolektivitas akan akan lebih bagus kalau terlembaga
3. Rasa solidaritas dan identitas kolektif.
4. Kontinuitas atau dilakukan secara terus menerus secara sistematis

²⁷ Hasanuddin Saleh, M. (2007). Gerakan Politik Perempuan Di Indonesia. Jurnal Nakhoda

Perempuan dalam partai golkar sudah memiliki agenda kerja yang ingin diwujudkan bagi kepentingan perempuan dan partai golkar, yang terdapat dalam program kerja organisasi sayap perempuan yakni: Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya(KPPG). Agenda yang dimaksud adalah : meningkatkan jumlah perempuan dan upaya menduduki posisi strategis dalam kepengurusan partai golkar, upaya pemenangan perempuan dalam menghadapi pemilihan umum,dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak terkait isu-isu aktual yang mendasar Untuk memperjuangkan suatu kepentingan melalui suatu gerakan maka perempuan harus mempunyai terlebih dahulu memiliki agenda yang telah direncanakan atau disusun secara jelas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perempuan dalam partai golkar telah menyusun beberapa program kerja bidang perempuan pada periode 2009-2014, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut bidang kesejahteraan dan peningkatan kapasitas perempuan melalui program rencana kerja yang berbasis sosial budaya dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,yang meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan orientasi dan konsolidasi organisasi, penguatan kelembagaan(peningkatan kapasitas) perempuan di tingkat kota,kecamatan,kelurahan untuk kemenangan partai golkar.
- b. Meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya perempuan, pengkaderan,pendidikan,pemberdayaan, dan pengembangan kader perempuan di tingkat kota,kecamatan, kelurahan yang dilaksanakan

oleh organisasi yang mendirikan organisasi sayap partai golkar untuk upaya kemenangan partai golkar.

- c. Menyusun dan mengembangkan berbagai kebijakan, program, kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kota,kecamatan, kelurahan untuk kemenangan partai golkar.

Melalui ketiga program kerja tersebut di atas maka terdapat beberapa agenda yang ingin diperjuangkan oleh perempuan partai golkar, yang meliputi :

- a. *Meningkatkan jumlah perempuan dan upaya menduduki posisi strategis dalam kepengurusan partai golkar dan menjadi anggota legislatif yang terus berupaya menyuarkan hak-hak perempuan.*

Undang Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik secara tegas telah menentukan posisi perempuan atau porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik baik pada level pusat maupun daerah. Keterlibatan perempuan dengan quota 30% tersebut harus dinyatakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik (AD / ART).

Ketentuan ini merupakan kesempatan yang baik bagi perempuan bukan hanya untuk berkiprah dalam panggung politik saja tetapi dapat mendorong partai politik menciptakan kader pemimpin perempuan. Dalam partai golkar kiprah perempuan terhimpun secara khusus dalam organisasi yang dinamakan Kesatuan Perempuan Partai Golkar.

KPPG dalam melaksanakan aktivitasnya melakukan pemberdayaan perempuan di segala bidang kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut maka prioritas yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kedudukan dan partisipasi kader perempuan partai Golkar pada posisi strategis di partai maupun di lembaga-lembaga politik lainnya.

Tugas Kesatuan Perempuan Partai Golkar meliputi 4 hal, yakni :

1. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan partai Golkar
2. Melakukan kegiatan dalam rangka rekrutmen, pengkaderan, penggalangan dan pengembangan massa partai Golkar sesuai bidang dan kelompok strategisnya
3. Mempersiapkan kader-kader perempuan partai Golkar dalam rangka regenerasi kepemimpinan partai Golkar
4. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi sejenis beserta kegiatannya yang terkait dengan bidang dan kelompok strategisnya.

Keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai Golkar akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpolitik, mempengaruhi dan menciptakan perubahan-perubahan dengan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi atau kepentingan perempuan (keluarga). Hal tersebut akan mudah dicapai apabila partai Golkar memberikan ruang bagi perempuan. Karena partai Golkar sebagai sebuah partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam perluasan partisipasi politik (perempuan). Peningkatan jumlah perempuan yang signifikan dalam partai Golkar dapat lebih menjamin terakomodirnya kepentingan

perempuan dalam setiap kebijakan yang diprioritaskan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam kepengurusan partai golkar tersebut dilakukan aktivitas-aktivitas oleh perempuan partai golkar bersama organisasi sayap perempuannya melalui pendekatan kepada masyarakat untuk menarik simpati/perhatian masyarakat. Kesatuan Perempuan Partai Golkar merupakan organisasi sayap perempuan, yang pembentukannya merupakan salah satu strategi untuk menghimpun kekuatan politik perempuan.